

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A., Daim Nuriyanto, 2019, *Hukum Perizinan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Teknologi Informasi dalam Perspektif Good Governance*, LakBang Justitia, Yogyakarta.
- Ahmad, Kamaruddin, 1996, *Dasar-Dasar manajemen Investasi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anisah, Siti dan Lucky Suryo Wicaksono, 2017, *Hukum Investasi*, FH UII, Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dyah, Ana Rokhmatussa' dan Suratman, 2009, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fadjar, Abdul Muktie, 2016, *Sejarah Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Hadjon, Philippus M, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HR., Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- HS., Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.

- Mertokusumo, Sudikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Pramono, Nindyo, 2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT Grasindo, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak, Sigit Rochadi, Rusman Ghazali, Akhmad Muksin, Didit Setiabudi, Djohan Bima, Syaifudin, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik (teori, kebijakan, dan implementasi)*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi penelitian Hukum dan Juemetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Supakmoko, M., 1882, *Asas-Asas Ilmu Keuangan Negara*, Liberty Offset, Yogyakarta.
- Supanca, Ida Bagus Rahmadi, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Untung, Hendrik Budi, 2013, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utrecht, E., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Wahyudi, Andi, 2014, *Model Reformasi Birokrasi di Kalimantan*, PKP2A III LAN, Samarinda.

## **Jurnal, Laporan Penelitian, Makalah**

- Akhmaddhian, Suwari, “Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal Di Daerah (Studi Kasus Di Pemerintahan Kota Bekasi)”, *Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas JendraSoedirman*, Volume 12, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2012.
- Atah, Said, Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal Dalam Kerangka Otonomi Khusus Di Provinsi Aceh, *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2015.
- Basah, Sjachran, “Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi”, *Makalah Hukum Administrasi dan Lingkungan Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, Tahun 1995.
- Baidarusa, Muhammad, Chintya Dewi Nimas Ayu Anggraeni, dan Hazada Zafira Mauliza, “Tinjauan atas Regulasi Penanaman Modal Guna Meningkatkan Ketertarikan Investasi Infrastruktur Strategis di Indonesia”, *Jurnal BPPK*, Volume 11, Nomor 1 Tahun 2018.
- Haryati, dwi dan Mailinda Eka Yuniza, “Penerapan Asas Umum Pemerintah Yang baik Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Satu Pintu” , *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Bulan Juni, Tahun 2012.
- Hendrayady, Agus, “Reformasi Administrasi Publik”, *Jurnal Fisip Umrah*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2011.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia”, *Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum*, Jakarta, Tahun 2016.
- Mattalatta, Andi, “Politik Hukum Perundang-Undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4, Bulan Desember, Tahun 2009.
- Mulyadi, Budi, “Pelayanan Perizinan Terpadu dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM”, *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Volume 4, Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2018.
- Namaga, Padma Bunga, Implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Dan Perkembangan Investasi Di Kota Tangerang, *Tesis*, Tidak Dipublikasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Tahun 2016.

Nurhayati, Irna, Karina Dwi Nugrahati Putri, Veri Antoni, Sulitiowati, dan Nindyo Pramono, "Pendaftaran Badan Usaha Secara Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Elektronik, *Jurnal Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 2, Bulan November, Tahun 2019.

Rustiani, Frida, "Izin Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban siapa?", Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta, Tahun 2003.

Tambunan, Tulus Tahi Hamonangan, Tambunan "Kendala Perijinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia Dan Upaya Perbaikan Yang Perlu Dilakukan Pemerintah", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007.

## INTERNET

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "reformasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/reformasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2019.

CNN, Advertorial, "Kejar Target Investasi Pemerintah Perbaiki Sistem OSS", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191130152245-297-452935/kejar-target-investasi-pemerintah-perbaiki-sistem-oss>, diakses pada tanggal 14 Desember 2019.

Heriani, Fitri N, "Catatan Problematika Perizinan dan Investasi di Tahun 2018". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c29cd28afab2/catatan-problematika-perizinan-dan-investasi-di-tahun-2018>. diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

\_\_\_\_\_, "Potensi Masalah Hukum Pasca Terbitnya PP Perizinan Terintegrasi". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b46e638b08e5/potensi-masalah-hukum-pasca-terbitnya-pp-perizinan-terintegrasi>, diakses pada tanggal 25 April 2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Izin Berusaha Kini Lebih Mudah (Menko Perekonomian Resmi Meluncurkan Sistem OSS)", <https://ekon.go.id/press/view/oss-online-single-submission.4093.html>, diakses pada tanggal 22 Maret 2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha*”,  
<http://jakon.pu.seruyankab.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Pedoman-Indonesia-OSS.pdf>, diakses pada tanggal 21 November 2019.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perbaikan Peringkat Indonesia”, <http://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020, pukul 21.22 WIB.

Puspasari, Ariesta Riendrias, “Badan Koordinasi Penanaman Modal”,  
[https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaraan\\_pers/Siaran\\_Pers\\_BKPM\\_230316\\_Sebagian\\_Besar\\_Deregulasi\\_Perbaikan\\_Kemudahan\\_Berusaha\\_Telah\\_Diselesaikan.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaraan_pers/Siaran_Pers_BKPM_230316_Sebagian_Besar_Deregulasi_Perbaikan_Kemudahan_Berusaha_Telah_Diselesaikan.pdf), diakses pada tanggal 15 Januari 2020.

Satrianegara, Rivi, “OSS Di Luncurkan Izin Usaha Di Republik Indonesia Kini Bisa Online dan Terpusat”,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20180709085458-4-22544/oss-diluncurkan-izin-usaha-di-ri-kini-bisa-online-terpusat>, diakses pada tanggal 06 November 2019.

Widodo, Joko, “OSS/ Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, <https://oss.go.id/oss/#>, diakses pada tanggal 21 September 2019.

## **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Nomor 4724).

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221).

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2010).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.